

ANALISIS SINKRONISASI KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Eki Darmawan

Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang, Indonesia

ekidarmawan@umrah.ac.id

ABSTRACT

Riau Islands is a province with quite high foreign tourist visits (tourists), ranking second after Bali, Kepri is the province that should maximize this potential to reap PAD and as a contributor to high state financial contributions, but in field conditions it is proven In Riau Islands GDP growth has not been too significant for the welfare of the community and has not made tourism a leading sector, even though this sector plays an important role because it is already in the top three for most foreign tourists in Indonesia. So on this basis, this study will discuss the synchronization of tourism institutions and policies in the Riau Islands Province, with a qualitative method described descriptively. If you look at the complexity and unsynchronization of bureaucracy and policies ranging from planning to tourism implementation, an adaptive policy is needed in developing tourism to match the development of tourist trends. Institutional problems of all stakeholders require synchronization from planning to implementation.

Keywords: *Tourism Policy, Economic Development, Development Planning.*

ABSTRAK

Kepulauan Riau merupakan Provinsi dengan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang cukup tinggi, dengan berada di urutan kedua setelah Bali, Kepri menjadi Provinsi yang seharusnya memaksimalkan potensi ini untuk meraup PAD dan sebagai penyumbang kontribusi keuangan negara yang tinggi pula, namun pada kondisi dilapangan dengan dibuktikan pada pertumbuhan PDRB Kepri belum terlalu signifikan dapat mensejahterakan masyarakat dan belum menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan, padahal sector ini cukup berperan penting karena sudah berada di tiga besar wisman terbanyak di Indonesia. Maka atas dasar ini, penelitian ini akan membahas sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, dengan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Jika melihat rumitnya dan tidak sinkronnya birokrasi dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pariwisata, maka diperlukan Kebijakan yang adaptive dalam membangun pariwisata agar sesuai dengan perkembangan trend wisatawan.

Permasalahan Kelembagaan dari semua Stakeholder dibutuhkan sinkronisasi mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaan.

Kata kunci: Kebijakan Pariwisata, Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di dalam Rencana Pembangunan Nasional telah ditargetkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Namun apakah sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau? Hal ini tentu dapat dilihat dari Kontribusi Sektor Pariwisata itu sendiri. Untuk memaksimalkannya tentu diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan baik antar pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi.

United Nations and World Tourism Organization selanjutnya disingkat UNWTO, mendefinisikan pariwisata (*tourism*) adalah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang didefinisikan sebagai pergerakan orang-orang di luar lingkungan negara atau tempat tinggal untuk tujuan pribadi atau bisnis/profesional, yang kebanyakan dilandasi oleh **motif untuk rekreasi**. Orang-orang ini disebut wisatawan (atau turis, baik yang berasal dari penduduk atau non-penduduk) yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, beberapa di antaranya dapat diukur lewat pengeluaran pariwisata (LPEM-FEBUI, 2018).

Dalam *United Nations World Tourism Organization and OECD* (2008) rerangka metodologi yang diusulkan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian, salah satunya adalah menggunakan prosedur **Multipliers**. Prosedur **Multipliers** mengkonversikan nilai konsumsi wisatawan, baik secara total atau berdasarkan kategori produk yang dikonsumsi, dilihat berdasarkan pengaruh

estimasi yang ditimbulkan pada perekonomian. Bahasan pengaruh estimasi pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mendeskripsikan kondisi ideal, kemudian dibandingkan dengan kondisi nyata, melalui 6 (enam) aspek, yaitu:

1. Pengeluaran Wisatawan
2. Pajak Pariwisata
3. Event Wisata
4. Usaha Pariwisata
5. Investasi Pariwisata
6. Pendidikan Masyarakat

Inskeep (1994) telah mengidentifikasi keuntungan sebuah perencanaan kepariwisataan nasional dan daerah sebagai berikut.

1. Menetapkan seluruh tujuan dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut?
2. Membangun kepariwisataan sehingga penggunaan sumber daya alam dan budaya yang tanpa batas dipertahankan dan dikonservasi untuk masa depan, demikian juga saat ini.
3. Mengintegrasikan kepariwisataan ke dalam kebijakan pembangunan secara menyeluruh dan pola-pola suatu negara atau daerah serta menetapkan keterkaitan antara kepariwisataan dengan sektor-sektor ekonomi.
4. Menyediakan basis rasional untuk pengambilan keputusan oleh sektor publik dan privat di bidang pembangunan kepariwisataan.
5. Mengadakan koordinasi dengan seluruh unsur sektor kepariwisataan. Hal ini mencakup inter-relasi atraksi-atraksi untuk wisatawan, aktivitas, fasilitas, dan layanan serta berbagai segmentasi pasar wisatawan.
6. Mengoptimalkan dan menjaga keseimbangan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kepariwisataan, distribusi manfaat secara adil dan merata kepada masyarakat, di samping mengurangi masalah akibat kepariwisataan.
7. Menyediakan sebuah struktur fisik yang menunjukkan lokasi, tipe atraksi-atraksi yang akan dibangun dan dikembangkan, fasilitas-fasilitas, layanan-layanan, dan infrastruktur.
8. Menetapkan garis besar dan standar untuk menyiapkan perencanaan detail wilayah pembangunan kepariwisataan yang konsisten dengan, saling

menguatkan, serta merancang fasilitas-fasilitas secara tepat untuk wisatawan.

9. Meletakkan dasar implementasi perencanaan dan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang efektif dan manajemen sektor pariwisata yang berkelanjutan, dengan menyediakan organisasi yang diperlukan dan kerangka kelembagaan lainnya.
10. Menyediakan kerangka koordinasi sektor publik dan privat serta investasi pembangunan kepariwisataan.
11. Menawarkan sebuah standar minimum untuk pemantauan pembangunan kepariwisataan secara terus menerus dan menjaganya agar sesuai dengan yang direncanakan.

Meskipun banyak manfaat perencanaan jangka panjang kepariwisataan, masih banyak kabupaten / kota yang tidak memilikinya. Mengapa? Mungkin destinasi itu tidak menempatkan sektor kepariwisataan sebagai prioritas utama. Di samping itu, di beberapa tempat masih ada keyakinan bahwa sektor privat dapat mengurus perencanaannya dan tidak melibatkan pihak lain. Argumen ketiga, menolak perencanaan jangka panjang karena terlalu banyak waktu dan biaya. Alasan keempat, karena perencanaan kepariwisataan yang kompleks melibatkan banyak lembaga pemerintah, sektor privat, dan organisasi nirlaba serta individu-individu.

Spesifik untuk Kepulauan Riau yang terletak pada posisi strategis, yaitu berbatasan dengan beberapa negara tetangga, tentu memiliki peluang yang cukup besar untuk dikunjungi oleh wisatawan. Apalagi dengan pemandangan alam bahari yang indah lengkap dengan sumber daya laut yang tersembunyi. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi dan penghasil devisa negara dan pendapatan daerah. Disamping itu jika sektor pariwisata berkembang tentu ketersediaan lapangan kerja akan terbuka. Selama periode 2016–2018, sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah seluruh wisman yang berkunjung ada sebanyak 2,635 juta orang. Jumlah ini meningkat sebesar 561 ribu orang dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan jumlah kunjungan wisman belum

tentu berkorelasi positif dengan jumlah devisa yang mampu diraih karena hal tersebut terkait dengan daya beli dan beberapa hal lainnya.

Dengan kondisi yang mendukung ini tentu diperlukan strategi dan perencanaan yang baik pula, kemudian diperlukan juga alternative-alternative kebijakan yang menginterpendensi perbaikan untuk mencapai integrasi perencanaan antar kabupaten/kota. Jika, dilihat perkembangan perencanaan pariwisata di Provinsi kepulauan riau masih terjadi inkonsistensi dan ego sektoral tiap-tiap kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisatanya masing-masing. Permasalahan ini terlihat pada salah satunya mengenai Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDAPAR) Provinsi dan Kabupaten / kota yang tidak sinergis. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa Kabupaten / Kota yang ada di Kepri masih belum memiliki RIPDAPAR dan yang sudah memiliki RIPDAPAR pun masih mengedepankan ego sektoral kewilayahannya dalam mengembangkan pariwisata sehingga tidak menunjukkan perencanaan yang terintegrasi secara utuh.

Selanjutnya dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki provinsi Kepri dan Kabupaten/Kotanya tidak menunjukkan Jumlah kontribusi PAD sektor pariwisata yang signifikan, karena dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dan kontribusi pajak hotel bukan berdasarkan jumlah besaran rata-rata belanja wisatawan yang berkunjung. Kemudian untuk perencanaan pariwisata yang ada masih bersifat parsial, seharusnya membutuhkan keterlibatan semua *stakeholders* bukan hanya bertumpu pada dinas pariwisata, melainkan lembaga dan aktor dari dalam maupun dari luar pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif yang digunakan merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-

kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi berikut :

- a. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
- b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, focus group discussion (FGD), dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi ideal untuk mengukur Pengeluaran Wisatawan adalah dengan membandingkan trend Jumlah Wisatawan dengan PDRB Sektor Pariwisata. Data PDRB Sektor Pariwisata diambil dari BPS (2019) Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2019 pada bagian Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha 2014-2018, untuk Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (*Accommodation and Food Service Activities*). Berikut disajikan trend Jumlah Wisatawan dibandingkan dengan PDRB Sektor Pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2014-2018, dalam bentuk tabel dan grafik.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan dan PDRB Sektor Pariwisata Kepri 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	1.973.425	2.037.673	1.920.232	2.139.962	2.635.664
Jumlah Wisatawan Nusantara (Orang)	1.431.864	1.450.000	1.482.000	2.891.123	3.547.971

PDRB Sektor Pariwisata (Milyar Rp)	3.481,01	3.951,43	4.346,14	5.061,47	5.628,20
---	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Data Olahan, 2020

Jumlah Wisatawan Mancanegara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014-2018, kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Sedangkan jumlah Wisatawan Nusantara selalu mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB Sektor Pariwisata yang mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014-2018.

Tabel. 1.2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan dan PDRB Sektor Pariwisata Kepri 2015-2018

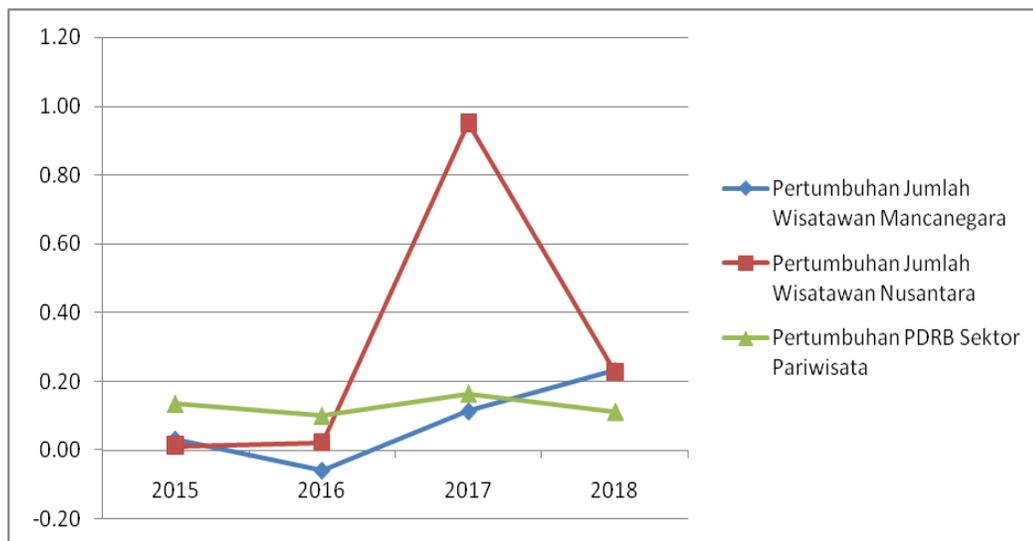
Indikator	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	0,03	-0,06	0,11	0,23
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	0,01	0,02	0,95	0,23
Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,14	0,10	0,16	0,11

Sumber: Data Olahan, 2020

Meskipun mengalami peningkatan dari segi jumlah, hal tersebut tidak terjadi jika diukur dari segi pertumbuhan. Pertumbuhan jumlah Wisatawan Mancanegara pada tahun 2015, 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan positif dan naik dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya negatif dan turun dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah Wisatawan Nusantara pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami pertumbuhan positif dan naik dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhannya positif dan turun dan turun dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan jumlah PDRB Sektor Pariwisata pada tahun 2015 dan 2017 mengalami pertumbuhan positif dan naik, sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 pertumbuhannya positif dan turun. Ketidaksinkronan pertumbuhan dari aspek pengeluaran wisatawan dimana pertumbuhan jumlah wisatawan tidak diikuti oleh pertumbuhan yang sama pada PDRB Sektor Pariwisata dapat terjadi dikarenakan belum optimalnya dampak langsung pengeluaran wisatawan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik. 1.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan dan PDRB Sektor Pariwisata Kepri 2015-2018



Sumber: Data Olahan, 2019

Sinkronisasi Event

Provinsi Kepulauan Riau memiliki Event pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari event Lokal (Kabupaten/Kota), event Provinsi serta event nasional. Dalam agenda 2020 terdapat 5 event lokal Kepulauan Riau yang menjadi event

nasional. Event-event tersebut antara lain Iron Man, Tour de Bintan, Bintan Triathlon, Festival Pulau Penyengat, Festival Kenduri Seni Melayu. Pola koordinasi dalam perencanaan dilaksanakan diawal tahun melalui musrenbang dengan melibatkan seluruh Disbudpar 7 Kabupaten dan Kota.

Gambar 1.1. Pola Koordinasi Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dan Disbudpar Kabupaten dan Kota di Kepri



Sumber: diolah dari data lapangan, 2020

Untuk koordinasi bersifat saling berbagi, untuk kegiatan yang masuk kalender (*Calender of Event*). Koordinasi bersifat struktural yaitu Kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh Koordinasi antara Kementerian dan Kabupaten/Kota yang bersifat koordinasi anggaran (*Sharing Dana*) yaitu pembagian alokasi dana dengan mekanisme penunjukan langsung (PL). Koordinasi antara lembaga struktural ini bersifat intens terutama antara kementerian dan Kabupaten/Kota. Untuk koordinasi dalam bentuk event intensitasnya 3 (tiga) kali yaitu Laporan Perencanaan, Laporan Ekspose (dihadapan Menteri dan Deputi) dan Laporan Kegiatan.

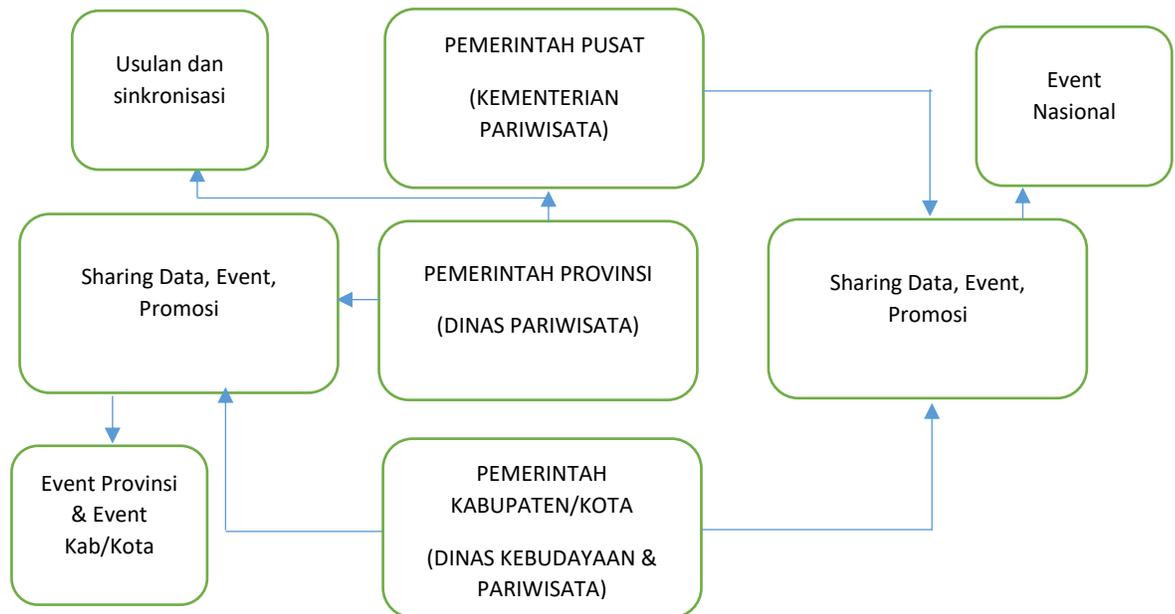
Berbeda dengan koordinasi Kementerian dengan Kabupaten/Kota, koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak intens, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota sering melewati/tidak berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi ketika event atau promosi itu bersifat nasional (event Kabupaten/Kota yang masuk kalender

nasional) ketika sedang melakukan koordinasi event atau promosi dengan Kementerian Pariwisata. Kondisi tidak berkoordinasi dengan Provinsi dikarenakan akan menghambat efektifitas dan efiseinsi event atau promosi. Hambatan tersebut terjadi akibat Dinas Pariwisata Provinsi memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang lambat.

Koordinasi yang kurang intens antara Provisnis dan Kabupaten/Kota dalam event lokal yang masuk dalam kalender nasional, berbeda dengan koordinasi dalam event skala Provinsi. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota terjalin dengan baik, koordinasi antar lembaga struktural dimulai dari musrenbang provinsi dengan bentuk dukungan antar lembaga. Penyampaian event-event Kabupaten/Kota yang masuk dalam kalender daerah dilakukan walaupun jumlahnya relative kurang, terutama untuk daerah Kabupaten/Kota yang secara lokasi jauh seperti Natuna dan Anambas.

Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran event dan promosi dilakukan untuk menghindari tumpang tindihnya agenda dan kegiatan yang sama. Secara lebih spesifik koordinasi dilakukan agar bentuk dukungan tidak dalam bentuk yang sama, sebagai contoh dalam penyelenggaran event, Provinsi telah menyediakan tenda dan transportasi sehingga Kabupaten/Kota tidak menyediakan item yang sama. Sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat belum tersusun dengan baik, hal ini mulai terjadi dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) , indikator Renstra.

Gambar 1.2. Pola Koordinasi Kemenpar, Dispar Provinsi Kepri Dan Disbudpar Kab/Kota Se-Kepri Dalam Pembentukan Event Nasional



Sumber: diolah dari data lapangan, 2020

Setiap bulan September pemerintah Kabupaten/Kota memberikan usulan event ke Provinsi dengan jumlah usulan minimal 5 (lima) event. Usulan tersebut dibawa oleh Provinsi ke Kementerian Pariwisata, untuk selanjutnya di seleksi oleh tim Kurator (terdiri dari 3-5 orang) untuk selanjutnya diseleksi menjadi event Nasional. koordinasi penyelenggaraan event dilaksanakan 3 kali yaitu laporan, ekspose, laporan kegiatan.

Gambar 1.3. Pola Koordinasi Kemenpar, Dispar Provinsi Kepri Dan Disbudpar Kab/Kota Se-Kepri Dalam Pembentukan Event Nasional



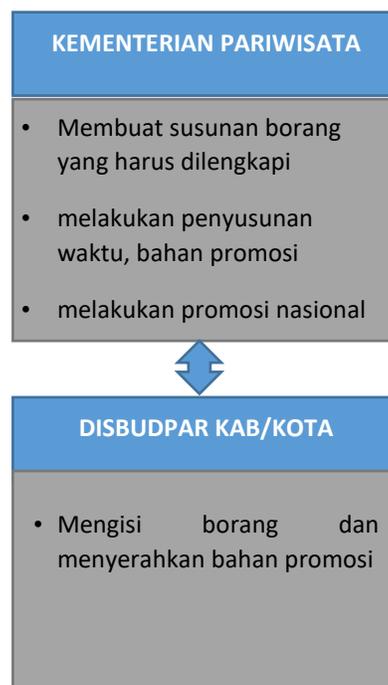
Sumber: diolah dari data lapangan,2020

Penyelenggaraan sebuah event adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan kerjasama sinergi antar tim atau pihak penyelenggara event. Dengan pola koordinasi diatas dirasa menjadikan hambatan bagi Kabupaten/Kota untuk menonjolkan ciri khas kedaerahannya melalui sebuah event dan akan terjadi tidak sinerginya mana yang akan dijadikan prioritas event oleh pusat, provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi Pelaksanaan Promosi

Dalam pelaksanaan promosi seluruh lembaga baik Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Disbudpar Kab/Kota memiliki peran yang sama yaitu promosi wisata. Peran promosi dilakukan secara terpisah dan juga terkoordinasi. Koordinasi yang paling baik terjadi dalam pola koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Disbudpar Kab/Kota. Pola ini terjadi ketika event yang diusulkan Disbudpar Kab/Kota menjadi event Nasional.

Gambar 1.4. Pola Koordinasi Kemenpar dan Disbudpar Kab/Kota Se-KePRI Dalam Promosi Nasional & Internasional

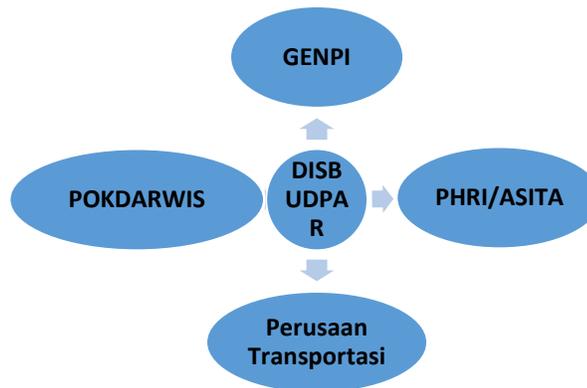


Sumber: diolah dari data lapangan, 2020

Pola promosi yang dikembangkan di tiap instansi pariwisata bersifat terputus-putus atau tidak terarah secara maksimal. Tiap instansi memiliki program dan anggaran sendiri. Sebagai contoh di tahun 2017 Dinas Pariwisata Kepulauan Riau

mengalokasikan anggaran Rp. 1.203.006.250 untuk Promosi Pariwisata Mancanegara, hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi Pariwisata Mancanegara. Dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Disbudpar tiap-tiap Kabupaten/Kota melakukan kerjasama promosi secara terbatas.

Gambar 1.5. Jaringan Promosi tiap Kabupaten/Kota



Sumber: diolah dari data lapangan, 2020

Program promosi di level Kabupaten/Kota menggunakan jaringan komunitas dan masyarakat yaitu Genpi & Pokdarwis serta jaringan asosiasi pariwisata yaitu PHRI & ASITA, dan *Private sector* yaitu Perusahaan penerbangan Garuda dan Lion. Jaringan promosi ini bersifat *accidental* atau hanya ketika ada event berlangsung.

Pengembangan SDM Masyarakat dibidang Pariwisata

Tujuan pembangunan manusia adalah meningkatkan dan memperkuat visi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan daya saing manusia. Salah satunya adalah pembangunan sektor ekonomi dengan peningkatan potensi sumber daya manusia dan berkembang seiring dengan tujuan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan angkatan muda banyak yang putus sekolah, lapangan kerja yang menuntut setiap pekerja harus memiliki

ketrampilan. Dari pendidikan nonformal akan mampu mengurangi permasalahan klasik seputar dunia kerja.

Perkembangan pariwisata dalam arti luas telah menciptakan banyak kesempatan pada sektor informal yang sebagian besar tidak memerlukan persyaratan keahlian tertentu. Di sisi lain, lapangan pekerjaan yang mengharuskan keterampilan atau pendidikan khusus jumlahnya terbatas dan masih banyak yang belum mampu dimasuki oleh para pekerja Kepulauan Riau (terjadi *miss match* ketenagakerjaan), seperti juga yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

Semestinya strategi yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pariwisata adalah (i) berkoordinasi dengan penyedia SDM pariwisata seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di bidang pariwisata; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan pariwisata, memperluas jurusan dan minat serta membangun sekolah pariwisata; dan (iii) berkontribusi dan menjaga kualitas pendidikan pariwisata.

Namun pada kondisinya untuk sekolah / pendidikan yang bergerak dibidang pariwisata saja masih sedikit jika dibandingkan dengan rasio kunjungan wisatawan yang terus meningkat maka seharusnya dapat menjadi peluang untuk menambah lapangan pekerjaan dibidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1.3. Jumlah Sekolah / Pendidikan yang Bergerak di Bidang Pariwisata Provinsi Kepri

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
NEGERI		
1	SMKN 2 BATAM	JL. PEMUDA NO 5 BATAM CENTRE
2	SMKN 3 BATAM	JL. LETJEN S.PARMAN
3	SMKN 1 TANJUNGPINANG	JL. PRAMUKA NO 6
4	SMKN 2 TANJUNGPINANG	JL. PRAMUKA NO 1
5	SMKN 2 BINTAN	JL. KORINDO KM. 22

6	SMKN 2 KARIMUN	JL. PAYACINCIN SUNGAI BATI
7	SMKN 2 LINGGA	JL. BUKIT KUALI DAIK LINGGA
8	SMKN 1 ANAMBAS	JL. HAJI ALI NO. 38 AIR SIUK
SWASTA		
9	SMK MUHAMMADIYAH	JL. MEKAR SARI NO. 3 TANJUNG UBAN - BINTAN
10	SMK PARIWISATA BUNGURAN TIMUR	JL. TEGUL KHUSU BATU NAGA SUNGAI ULU - NATUNA
11	SMK MAHARDIKA SINGKEP	JL. NAVIGASI - SINGKEP - LINGGA
12	SMK EPPATA BATAM	PERUM MUKA KUNING PARADISE - BATAM
13	SMK INDO MALAY SCHOOL BATAM SMK MANAGEMENT TRAINING	TEMBESI, SAGULUNG - BATAM
14	SYSTEM	BATAM CENTRE - BATAM
15	SMK 2 WIDYA BATAM SMK TUNAS MUDA BERKARYA	TIBAN - BATAM
16	BATAM	SAGULUNG - BATAM
17	SMK PLUS KEMILAU BANGSA	BATU AJI - BATAM
18	SMK HARMONI BATAM	BENGGONG JAYA - BATAM
19	SMK WIDYA 3 BATAM	BATU AJI - BATAM
20	SMK WIDYA BATAM	SUNGAI JODOH - BATAM
21	SMK PARIWISATA ENSKU KELANA	JL. TUGU PAHLAWAN - TANJUNGPINANG
PERGURUAN TINGGI PARIWISATA		
No	NAMA	ALAMAT
22	BATAM TOURISM POLYTECHNIC	BATAM
23	UNIVERSITAS INTERNATIONAL BATAM	BATAM
24	SAHID BINTAN TOURISM INSTITUT	LAGOI
25	POLYTECHNIC BINTAN CAKRAWALA	LAGOI

Sumber : diolah dari data dilapangan,2020

Upaya pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Menurut Suwanto (2004 :55), langkah pokok dalam pengembangan pariwisata berupa optimasi, konsolidasi dan pengembangan dan penyebaran dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

- a) Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan,
- b) Meningkatkan mutu kerja,
- c) Meningkatkan kemampuan pengelolaan,
- d) Manfaatkan produk yang ada,
- e) Memperbesar saham dari pasar wisata yang telah ada.

Dengan kondisi pendidikan di Kepri yang dilihat pada table diatas menunjukkan sector pariwisata belum dapat berkembang sesuai dengan potensi pengembangan SDM melalui sekolah dan pendidikan khusus bidang pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari jumlah sekolah atau pendidikan bidang pariwisata masih sangat sedikit dan belum mampu merubah pola pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Sinkronisasi Kelembagaan

Pada posisi geostrategis daerah kepulauan dan perbatasan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah menjalankan berbagai program pembangunan kepariwisataan. Namun demikian, dampak ekonomis dari adanya *trend* peningkatan kunjungan wisatawan belum menampilkan pemetaan kontribusi yang baik bagi pendapatan daerah dari sektor ini, meskipun potensi pariwisata sudah terencana secara pasti, melalui dokumen perencanaan pengembangan strategis kawasan pembangunan pariwisata di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dari aspek aksesibilitas kawasan obyek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau relatif mudah dicapai melalui akses transportasi darat, laut dan udara. Kemudian dari aspek atraksi dan amenitas, Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya tarik wisata yang lengkap yaitu obyek wisata alam, budaya dan buatan manusia, tetapi belum semua obyek wisata tersebut didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. Produk wisata yang dikenal dengan 3 A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) merupakan suatu sistem,

dimana satu sama lain saling berkaitan, dibutuhkan pengelolaan yang terpadu antar produk wisata yang tersedia.

Sebagai suatu sistem yang kompleks, produk pariwisata yang dihasilkan berupa terbangunnya industri dan jasa pariwisata yang menarik dan memiliki karakteristik unik multidimensional (multi sektor, multi aktor, multi region dan multi aspek). Karakter pariwisata yang multidimensional tersebut menyebabkan sektor ini sangat tergantung pada keterpaduan dan keseriusan pemerintah daerah dalam terselenggaranya tujuan pembangunan pariwisata yang diinginkan. Sehubungan dengan karakter tersebut, sub bab ini akan menganalisis pendekatan perencanaan pembangunan pariwisata terutama pada unsur klaborasi dan sinergitas kelembagaan yang dibutuhkan pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan terlaksananya pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi pada sektor pendapatan daerah secara lebih baik. Langkah-langkah merumuskan perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik dan holistik untuk sektor pariwisata mesti diagendakan secara baik melalui peran stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) dalam mengintergrasikan program membangun pariwisata daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas menggambarkan terlalu rumitnya dan tidak sinkronnya birokrasi dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pariwisata, maka diperlukan Kebijakan yang adaptive dalam membangun pariwisata agar sesuai dengan perkembangan trend wisatawan. Permasalahan Kelembagaan dari semua Stakeholder dibutuhkan sebuah Badan atau Lembaga baru yang mengawasi dan mensinkronisasikan segala bentuk pengembangan Pariwisata dari Kabupaten/ Kota hingga Provinsi agar bisa sinergi.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Myra, P.2009. *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pariwisata Indonesia*, ITB Bandung.

Inskeep, E. 1994. *National and regional tourism planning: methodologies and case studies*. Routledge.

LPEM-FEBUI, 2018 Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia. Laporan Akhir. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Suwantoro, G. 2004. Di dalam bukunya Dasar-dasar Pariwisata. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.

United Nations World Tourism Organization and OECD. 2008. *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008)*, Madrid, New York.

Dokumentasi :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2019*

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2018*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2017*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2016*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2015*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2022

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 -2021.